

SEJARAH KEPEMIMPINAN SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (1824-1851) DALAM PERSPEKTIF ETIKA KEUTAMAAN

Dawam Azhuri Setyawanuddin Ancina¹, Wiwin Malinda²

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

dawa.azhuri.sa@mail.ugm.ac.id, malindawin@outlook.com

*korespondensi: malindawin@outlook.com

Abstrak

Penelitian yang berkaitan dengan sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus ini berangkat dari persoalan yang menunjukkan adanya jarak antara teori, nilai dan seperangkat aturan moral lainnya dengan pengejawantahannya di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama masyarakat Buton. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan penyebab dasar dan menemukan jawaban dari persoalan-persoalan tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian etika dan filsafat sejarah pragmatis, menggunakan pendekatan kualitatif, serta menitikberatkan pada studi kepustakaan. Pada proses pengolahan data, beberapa elemen metodologi yang digunakan, meliputi; interpretasi, kombinasi induktif dan deduktif, koherensi internal, komprehensif dan deskriptif. Hasil dari penelitian awal, dapat dikemukakan beberapa hipotesis sebagai berikut: 1) Manusia membutuhkan konsep moral keutamaan yang ada di dalam dirinya untuk terus menjadi manusia yang baik, 2) Konsep keutamaan moral itu dapat ditemukan di dalam ajaran dan sejarah masa lampau, dan 3) Bagi masyarakat Buton, konsep keutamaan moral itu dapat ditemukan melalui sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, serta 4) dari sejarah kepemimpinan tersebut, dapat menarik nilai-nilai, ajaran moral serta prinsip-prinsip moral sederhana yang dapat membantu masyarakat Buton memiliki pribadi yang baik.

Kata kunci: Etika Keutamaan, sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, filsafat sejarah pragmatis, nilai moral, dan ajaran moral.

LEADERSHIP HISTORY OF SULTAN MUHAMMAD IDRUS KAIMUDDIN (1824-1851) IN THE PERSPECTIVE OF VIRTUE ETHICS

Dawam Azhuri Setyawanuddin Ancina¹, Wiwin Malinda²

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Universitas Sanata Dharma, Indonesia

dawa.azhuri.sa@mail.ugm.ac.id, malindawin@outlook.com

*correspondence: malindawin@outlook.com

Abstract

This research, which relates to the history of Sultan Muhammad Idrus' leadership, departs from the problems that show the distance between theory, values and a set of other moral rules and their embodiment in social life, especially the Buton community. Therefore, this research aims to find the basic causes of these problems and find answers to these problems. This research is a type of pragmatic ethics and philosophy of history research, using a qualitative approach, and emphasizing on literature studies. In the data processing process, several methodological elements are used, including; interpretation, inductive and deductive combination, internal

coherence, comprehensive and descriptive. As a result of the preliminary research, the following hypotheses can be put forward: 1) Humans need the concept of moral virtues within themselves to continue to be good human beings, 2) The concept of moral virtue can be found in the teachings and history of the past, and 3) For the Buton people, the concept of moral virtue can be found through the history of the leadership of Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, and 4) from the history of leadership, can draw values, moral teachings and simple moral principles that can help the Buton people have a good personality.

Keywords: Virtue Ethics, leadership history of Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, pragmatic philosophy of history, moral values, and moral teachings.

Pendahuluan

Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin dikenal sebagai satu diantara para Sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Buton, sebuah kesultanan yang berdiri di daratan kepulauan Buton, yang kini secara administratif terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, negara Indonesia. Sultan Muhammad Idrus diperkirakan lahir pada tahun 1784, dan menjabat sebagai seorang Sultan Buton pada umur 40 tahun. Menurut sejarah perkembangan kesultanan Buton, yang telah dikemukakan di dalam laporan-laporan para sejarawan Buton, Sultan Muhammad Idrus pernah mengantarkan nuansa kesusastraan tulis di kesultanan Buton hingga mencapai era puncaknya. Bahkan pada saat itu, Sultan Muhammad Idrus sendiri juga berhasil melahirkan banyak karya sastra, disamping karya-karya dari buah pikiran orang-orang disekitarnya. Saat ini, sisa-sisa dari keberhasilan tersebut, dapat dijumpai melalui naskah-naskah yang masih dijaga oleh beberapa tokoh masyarakat Buton, satu diantaranya adalah koleksi naskah *Mujazi Mulku Zahari*.

Keberhasilan pada bidang sastra dan ilmu pengetahuan itu tidak menjadi satu-satunya aspek penilaian bagi sejarawan untuk menjadikan perjalanan kehidupan sultan Muhammad Idrus Kaimuddin sebagai objek pembahasan. Seperti halnya laporan sejarah yang ditulis oleh Aslim (1995) yang menaruh perhatian pada seluruh aktivitas kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin dalam judul “*Kesultanan Buton Pada Masa Pemerintahan Sultan Muhammad Idrus 1824-1851*”. Aslim di dalam karya tersebut, menjelaskan perjalanan kondisi Kesultanan Buton pada abad ke-19 dan sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus sendiri dalam berbagai aspek kehidupan. Perhatian mengenai Sultan Muhammad Idrus juga ditulis oleh Abd. Yunus (1995) dalam judul “*Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke-19*”. Buku ini menjelaskan sejarah dan posisi tasawuf di Kesultanan Buton, dan membahas mengenai peranan tasawuf di dalam prosesi kepemimpinan, terutama yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Selain kedua sejarawan di atas, perhatian mengenai Sultan Muhammad Idrus juga dilakukan oleh La Niampe (2010) dalam karya “*La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin Sastrawan Sufi Ternama di Buton Abad XIX*”. La Niampe di dalam karya tersebut mengungkapkan amalan-amalan serta nasihat-nasihat Sultan Muhammad Idrus di dalam menjalani kehidupannya sebagai pribadi seorang Muslim, yang memeluk agama Islam dan pribadi sebagai seorang Sultan.

Laporan-laporan sejarah di atas menunjukkan sebuah kemungkinan bahwa sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin mengandung sistem nilai dan ajaran moral yang dapat digunakan sebagai jalan keluar dari persoalan-persoalan moral di lingkup sosial masyarakat Buton. Bahkan sistem nilai dan ajaran moral itu tidak saja terkuak di permukaan dalam bentuk teoritis tetapi juga dipraktikan di dalam aktivitas praktis yang dicontohkan oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin sendiri.

Persoalan moral yang kerap terjadi di lingkungan sosial masyarakat yang melibatkan kepemimpinan dan aturan-aturan bernegara yang dapat diselesaikan dengan cara menilik sejarah masa lalu seperti sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus satu diantaranya adalah adanya jarak antara nilai, ajaran dan aturan- moral yang pada dasarnya telah ditetapkan di lingkungan tersebut. Ajaran dan aturan moral yang memiliki muatan nilai hanya dianggap sebagai narasi yang dalam keadaan tertentu tidak diamankan dengan baik oleh sebagian atau seluruh masyarakatnya. Tentu banyak hal yang mendasari munculnya jarak tersebut, seperti tidak menyukai keberadaan ajaran dan aturan moral karena mengekang kebebasan, tidak memberikan keberuntungan secara langsung, berada dalam situasi dilema etis, atau mungkin saja karena tidak ada pengawasan yang ketat serta hukuman yang berat. Apabila situasi-situasi tersebut dibiarkan, maka dapat memicu konflik-konflik sosial ataupun ketidak nyamanan serta ketidak amanan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Menurut tradisi filsafat moral atau etika, persoalan dan cara penyelesaian di atas termasuk ke dalam persoalan dan penyelesaian teori etika keutamaan. Teori etika keutamaan memandang suatu persoalan moral bukan pada satuan aktivitas, seperti layaknya teori etika deontologi yang menyorot satuan tindakan dengan memeriksa nilai baik pada tindakan itu sendiri dan teori etika teleologi yang memeriksa akibat dan tujuan yang dihasilkan dari satuan tindakan moral itu sendiri. Namun demikian, teori etika keutamaan lebih melihat aktivitas moral dari pelaku atau manusianya itu sendiri, yakni mengusahakan pelaku moral memiliki karakter yang baik atau mulia secara moral. Teori etika keutamaan menawarkan sebuah pertanyaan dasar yang dapat dipertanyakan dan dijawab langsung oleh masing-masing diri manusia sebagai pelaku moral “Aku akan menjadi manusia seperti apa?”.

Akhirnya, uraian di atas kemudian memantik beberapa persoalan; *Pertama*, bagaimana sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin? dan, *Kedua*, apa relevansi muatan etika keutamaan di dalam sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin di dalam kehidupan bermasyarakat orang Buton?

Metode

Penelitian ini pada dasarnya adalah jenis penelitian Filsafat Moral atau lebih dikenal dengan Etika dan filsafat sejarah pragmatis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menemukan penggambaran atau deskripsi secara luas dan mendalam mengenai sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Kaimuddin, menemukan dan menjabarkan konsep moral yang terkandung di dalam sejarah kepemimpinan, yang di dalamnya mengandung nilai dan ajaran serta praktik moral yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Penelitian dengan pendekatan dan tujuan di atas, kemudian menitikberatkan pada studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Oleh karena itu, penelitian ini condong pada dokumen, dan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, seperti jurnal dan buku yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Pada proses pengolahan data, penelitian ini melibatkan beberapa unsur-unsur metodis sebagai berikut: Interpretasi, kombinasi induktif dan deduktif, koherensi internal, komprehensif, dan deskriptif. (Bakker & Zubair, 1990:41-54)

Hasil dan Pembahasan

Pengertian dan Ruang Lingkup Etika Keutamaan

Etika Keutamaan, menurut C.B. Kusmaryanto merupakan teori etika yang tertua atau paling kuna di dalam sejarah perkembangan filsafat moral atau etika. Etika keutamaan pada dasarnya telah membersamai pemikiran manusia mengenai moral, sejak zaman Yunani Kuno yang dimulai oleh Socrates (470-399 SM), dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh murid-muridnya. Namun demikian, sekitar abad ke-19, etika keutamaan dapat dikatakan kalah

pamor dan mulai ditinggalkan dengan hadirnya teori etika normatif lainnya terutama seperti etika deontologi dan utilitarianisme. Para pemikir kemudian mulai kembali menaruh perhatian pada teori etika keutamaan, setelah kedua etika normatif tersebut, tidak mampu menjawab kegelisahan banyak orang (Kusmaryanto, 2022: 89-90).

Etika Keutamaan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, ἀρετή (arête) yang berarti kebajikan dan keutamaan (Kusmaryanto, 2022: 90). Berdasarkan arti kata arête itu, memantik munculnya pengertian-pengertian yang lebih luas, Sonny Keraf (2002: 36) misalnya, menjelaskan bahwa etika keutamaan (Virtue Ethics) tidak mempersoalkan akibat dari suatu tindakan, dan juga tidak mendasarkan pada kewajiban moral. Akan tetapi etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Pandangan lain juga dikemukakan oleh K.Bertens, yang menjelaskan bahwa etika keutamaan tidak menyoroti perbuatan satu demi satu, tetapi lebih memfokuskan pada manusia itu sendiri, apakah di dalam dirinya memiliki keutamaan (virtue), yang tercermin di dalam sifat watak yang dimiliki manusia, sehingga dapat dikatakan juga bahwa etika ini menyelidiki apakah kita sendiri orang baik atau buruk secara moral.

C.B.Kusmaryanto kemudian merumuskan empat keutamaan pokok, yang kemudian disebut dengan Cardinal Virtues, yang diambil dari tradisi skolastik serta di dalamnya memuat pandangan Plato dan Aristoteles. Empat keutamaan pokok itu meliputi; *prudence*, *temperance*, *fortitude*, dan *justice*. Pertama, *Prudence* dalam bahasa Indonesia berarti kehati-hatian, atau dapat juga disebut kebijaksanaan. Keutamaan ini didasari dengan sikap kehati-hatian atau kebijaksanaan untuk membentuk kemampuan untuk memilah tindakan yang paling tepat sesuai dengan situasi dan waktu yang tepat. Kedua, *temperance* dapat diartikan dengan kesederhanaan atau juga ughari. Keutamaan ini mengantarkan manusia sebagai pelaku moral memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, mengekang diri, dan mengendalikan nafsu. Ketiga, *fortitude* dalam bahasa Indonesia berarti ketabahan, dapat juga diterjemahkan dengan keberanian yang di dalamnya mencakup kesabaran, kekuatan, daya tahan, dan kemampuan untuk menghadapi ketakutan, ketidakpastian, serta intimidasi. Keempat, *justice* di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah keadilan dan mendung makna kebenaran. Keutamaan ini terwujud dalam aktivitas memberikan apa yang menjadi hak seseorang dan tidak memberikan kepada mereka yang tidak berhak. Pada prosesnya, keutamaan ini kerap mengharuskan manusia sebagai pelaku moral, untuk berani berkorban demi keadilan dan kebenaran tersebut (Kusmaryanto, 2022:93-94).

Keutamaan-keutamaan di atas, kemudian dapat diusahakan dengan prinsip-prinsip etika keutamaan. Menurut K.Bertens (2013:169-171), masih dalam sumber yang sama, mengemukakan ada beberapa prinsip dari etika keutamaan; Pertama, keutamaan adalah suatu disposisi. Keutamaan adalah sifat watak yang ditandai stabilitas, atau sifat baik yang mendarah daging pada seseorang. Kedua, keutamaan berkaitan dengan kehendak. Selalu mengarahkan kehendak untuk tetap pada kecenderungan kearah kebaikan. Pada proses ini, motivasi memegang peranan yang penting. Ketiga, Keutamaan dapat diperoleh melalui jalan membiasakan diri, dan merupakan hasil latihan yang berat yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga keutamaan bukan sesuatu yang dibawa sejak manusia lahir. Keempat, proses memperoleh keutamaan yang diusahakan oleh seseorang selalu disertai dengan upaya-upaya korektif, atau selalu diingat-ingat kembali untuk terus diusahakan, dibiasakan, dan terus diperbaiki kembali jika terjadi kekeliruan di dalam pelaksanaannya.

Keutamaan-keutamaan Moral dalam Sejarah Kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin

Etika keutamaan yang berfokus pada pengembangan karakter moral bagi setiap pribadi manusia ini satu di antaranya dapat di berlangsung dengan mengungkap nilai-nilai kepribadian yang ada pada sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Ini seperti jalan keluar yang ditawarkan oleh Sonny Keraf (2004:22-23) yang mengemukakan bahwa etika keutamaan sangat menekankan pentingnya sejarah dan cerita terutama dari tokoh-tokoh besar, karena di dalamnya mengandung nilai dan keutamaan, yang dapat menjadi teladan untuk ditiru, terutama dalam membentuk karakter yang baik. Menjadikan sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin sebagai perhatian utama berarti di dalamnya mencakup keterangan mengenai diri sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, masyarakat yang berkaitan dengan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, latar belakang saat Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin lahir hingga meninggal, serta berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, dan Sejarah Kesultanan Buton itu sendiri.

Etika keutamaan memfokuskan pada keseluruhan yang berkaitan dengan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran dan nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai salah satu gambaran bagi manusia untuk menciptakan karakter pribadi yang bermoral. Secara lebih spesifik, berdasarkan data-data laporan sejarah mengenai Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, berdasarkan perspektif etika keutamaan, Keutamaan-keutamaan moral yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Idrus, yang pada akhirnya menunjukkan karakter yang baik.

Menelusuri nilai dan ajaran etis keutamaan yang terkandung di dalam sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin, pertama-tama dapat dimulai dari latar belakang kehidupan yang mempengaruhi kepemimpinannya pada saat mengemban pucuk kepemimpinannya sebagai seorang Sultan Buton mulai dari lahir hingga meninggal dunia.

Keutamaan Moral pada Sejarah Pra-Kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin

Karakter kepemimpinan yang dimiliki oleh Sultan Muhammad Idrus merupakan hasil dari aktivitas pembelajaran dan pembiasaan diri dengan waktu yang cukup lama. Pembentukan karakter itu dimulai dari masa kanak-kanak dengan mengupayakan terlebih dahulu dalam pengenalan, pembelajaran dan pengamalan nilai-nilai agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran agama Islam ini, pada dasarnya adalah perbekalan hidup yang dijalankan oleh Muhammad Idrus untuk kehidupannya di masa depan. Merujuk pada keterangan yang dikemukakan oleh Aslim (1995:61-62), Proses pembelajaran agama yang ditekuni oleh Muhammad Idrus dari masa kanak-kanak itu terutama tidak lepas dari peran kakeknya sendiri, Sultan La Jampi. Seorang Sultan Buton ke-24 yang memerintah dari tahun 1763-1788.

Proses belajar agama yang dijalani oleh Muhammad Idrus ini, tidak lepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang yang berasal dari kaum bangsawan, tepatnya dari *kaomu Kumbewaha*. Muhammad Idrus diperkirakan lahir pada tahun 1784. Tahun ini mengacu pada tahun pengangkatannya sebagai seorang Sultan Buton pada tahun 1824, di umur 40 tahun. Ini menunjukkan bahwa Muhammad Idrus lahir saat kakeknya Sultan La Jampi masih menduduki pucuk kepemimpinan di Kesultanan Buton. Status sosialnya sebagai bagian dari kaum bangsawan ini, kemudian dipertegas dengan dilantiknya ayah Muhammad Idrus, Dayyanu Asraruddin sebagai Sultan Buton ke-27, sekitar tahun 1799-1822.

Hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh Muhammad Idrus dari masa kanak-kanak itu mulai nampak pada kediriannya saat menginjak dewasa. Pada saat itu, perbekalan hidup melalui ajaran-ajaran agama Islam yang dipelajarinya itu, telah membentuk Muhammad

Idrus sebagai pribadi yang memiliki ketinggian jiwa, keluasan pandangan (wawasan), serta kedalaman nilai rasa ke-Tuhanan dan Kemanusiaan. Tentu kelebihan-kelebihan tersebut, banyak tidak dimiliki oleh orang-orang seumurannya, bahkan ketika mendapat fasilitas yang sama sekalipun. Hasil proses ini, pada kemudian hari terus menampak hingga saat Muhammad Idrus diangkat menjadi *kapitalao* (Panglima perang) dan Sultan Buton ke-29.

Perjalanan hidup Muhammad Idrus sebelum memegang jabatan tertinggi dalam sistem pemerintahan kesultanan sebagai seorang sultan, ditempa dengan mengemban jabatan sebagai *Kapitalao*, di masa kepemimpinan Sultan Buton ke-28, Sultan Anharuddin. Seperti *Kapitalao-kapitalao* sebelumnya, Muhammad Idrus bertugas untuk memastikan keamanan negara, terutama dari serangan-serangan *tobelo* (bajak laut). Mandat sebagai *Kapitalao* ini benar-benar dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Satu diantara peristiwa-peristiwa penting selama Muhammad Idrus menjabat sebagai *Kapitalao*, ialah serangan Bajak laut yang berlangsung di daerah pasarwajo. Sebuah tempat yang saat ini berada di pesisir timur Pulau Buton.

Peristiwa serangan bajak laut di daerah Pasarwajo itu, terjadi sekitar tahun tahun 1823. Setelah Kesultanan mengetahui bahwa telah terjadi serangan besar-besaran yang dilakukan oleh bajak laut terhadap daerah pasarwajo sebagai bagian dari wilayah kekuasaan Kesultanan Buton, Muhammad Idrus sebagai seorang *kapitalao* beserta pasukannya diutus oleh Sultan Muhammad Anharudin untuk menuju area konflik dan menumpas serta mengusir *tobelo* dari daerah Pasarwajo. Atas perintah itu, Muhammad Idrus dengan penuh tanggung jawab dan ketaatan sebagai *Kapitalao* beserta pasukannya kemudian berangkat menuju Pasarwajo. Dengan kekuatan dan strategi yang baik, Muhammad Idrus beserta pasukannya kemudian dapat memenangkan pertempuran dan memaksa mundur para bajak laut itu dari wilayah Pasarwajo. Namun demikian, ditengah-tengah kemenangan itu potensi untuk terjadi serangan balasan dari pihak bajak laut masih sangat mungkin terjadi. Sehingga Muhammad Idrus beserta pasukannya memutuskan untuk tetap berada di wilayah Pasarwajo.

Pada saat proses pengamanan di Pasarwajo berlangsung, Muhammad Idrus justru mendapat perintah dari Sultan untuk kembali ke Kesultanan. Menurut Aslim (1995:70-73), pemanggilan itu bukan karena ada tugas yang juga mendesak di area sekitar Kesultanan. Pemanggilan tersebut, di dasarkan atas kerisauan Sultan Muhammad Anharuddin atas keselamatan anak menantunya itu. Berdasarkan alasan itu, tentu membuat *Kapitalao* Muhammad Idrus marah dan melayangkan keberatannya, atau dalam bahasa Buton dikenal dengan istilah *hereiya* pada dewan syara' atau *syara' Kesultanan*. Keberatan *Kapitalao* Muhammad Idrus ini didasarkan atas ketidak sesuaian antara perintah penarikan dan aturan adat yang berlaku, terutama falsafah perjuangan masyarakat Buton, yaitu :

"Yinda-yindamo arata somana karo"	"Korbankan harta demi keselamatan diri"
"Yinda-yindamo karo somana lipu"	"Korbankan diri demi keselamatan negara"
"Yinda-yindamo lipu somana sara"	"Korbankan negara demi keselamatan pemerintah"
"Yinda-yindamo sara somana agama"	"Korbankan pemerintah demi keselamatan agama"

(Dirman, 2018: 151)

Keberatan yang dilayangkan oleh *Kapitalao* Muhammad Idrus mendapat tanggapan yang cukup penting dari *syara' Kesultanan*. Syara' Kesultanan kemudian memberikan konsekuensi dengan menurunkan Sultan Muhammad Anharuddin dari jabatannya, dan kemudian mengangkat *Kapitalao* Muhamamad Idrus sebagai sultan berikutnya.

Keutamaan Pada Masa Kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin

Karakter sebagai pribadi yang memiliki keutamaan di dalam diri Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin juga terlihat di dalam prosesi pengangkatan dirinya sebagai sultan dan aktivitas

kepemimpinannya sebagai seorang Sultan Buton. Kedua proses itu, memberikan suatu gambaran bahwa karakter yang dimiliki oleh Muhammad Idrus memenuhi kualifikasi sebagai seorang pemimpin. Selain itu, karakter baik sebagai seorang pemimpin tunjukan di dalam laku kepemimpinan yang selalu dilandaskan pada aturan agama dan aturan adat yang berlaku di Kesultanan Buton.

Proses Pengangkatan Muhammad Idrus Kaimuddin sebagai Seorang Sultan Buton ke-29

Pengangkatan Muhammad Idrus sebagai seorang Sultan Buton pada dasarnya menggunakan jalan musyawarah yang diwakilkan dewan Siolimbona. Kata Siolimbona sendiri dalam bahasa Buton berarti (sembilan perkampungan). Dewan Siolimbona kemudian dapat diartikan sebagai dewan yang di dalamnya diisi oleh perwakilan-perwakilan dari sembilan wilayah yang membentuk Kerajaan/Kesultanan Buton pada waktu itu. Pemilihan ini bahkan lebih mendekati proses demokrasi, yang saat ini dipakai oleh negara Indonesia. Akan tetapi perlu diketahui bahwa hanya tiga golongan kaum bangsawan yang berhak menduduki jabatan sebagai Sultan. Tiga golongan ini masyhur disebut dengan "*kamboru-mboru Talupalena*" yang berarti "tiga tiang pancang" dan kemudian lebih jauh dikenal dengan "tiga golongan bangsawan" di tanah Buton. Tiga golongan itu meliputi; *kaumu Tapi-tapi*, *Tanailandu*, dan *Kumbewaha*.

Pada prosesi pengangkatannya sebagai Sultan, Muhammad Idrus tidak menggunakan fasilitasnya sebagai putra mahkota secara langsung, yang memiliki hak istimewa untuk diangkat begitu saja menggantikan kedudukan ayahnya sebagai seorang Sultan. Meskipun, Muhammad Idrus telah lahir sejak Kesultanan Buton berada dibawah kepemimpinan kakeknya, Sultan La Jampi. Ini disebabkan karena, memang konsep putra mahkota yang ada di Kesultanan Buton yang disebut dengan anana bangule, berbeda dengan konsep putra mahkota yang ada di kerajaan-kerajaan/kesultanan-kesultanan lainnya. Menurut Aslim (1995: 73) status anana bangule adalah anak yang lahir pada saat ayahnya masih berstatus sebagai seorang Sultan. Pim Schoorl (2003: 84) kemudian menambahkan bahwa, anak yang dimaksudkan adalah anak laki-laki dari istri pertama Sultan, mayat masih menjabat. Sehingga, menurut adat Kesultanan Buton anana bangule memiliki hak istimewa dapat menduduki posisi sebagai Sultan tanpa harus melewati prosesi pemilihan terlebih dahulu. Namun demikian, Aslim (1995: 73) dan Zuhdi Dkk. (1996: 33) juga mengemukakan bahwa sepanjang sejarah Kesultanan Buton, kasus pengangkatan seorang anana bangule hampir tidak pernah terjadi, atau setidaknya ada dua anana bangule yang diangkat menjadi seorang Sultan, Kedua anana bangule itu adalah Sultan Abdul Wahab, Sultan Buton ke-5, dan Sultan Muhammad Isa Kaimuddin, Sultan Buton ke-30.

Karena aturan adat mengenai anana bangule inilah yang membuat Muhammad Idrus dalam proses pengangkatannya sebagai seorang Sultan harus tetap melewati prosesi pemenuhan seluruh persyaratan yang ditentukan dalam hukum adat kesultanan Buton, seperti; faktor kebangsawanan, keluasan dan ketinggian ilmu Islam, serta hasil pengamatan batiniah Syara' Kesultanan, yang menunjukkan sebuah jaminan bahwa terjadinya keselarasan dan keserasian secara lahir batin antara Sultan Muhammad Idrus dengan rakyatnya, pasca dilantik sebagai seorang Sultan. Muhammad Idrus yang dilahirkan pada saat kakeknya masih menjabat sebagai seorang Sultan Buton, pada dasarnya telah menggambarkan bahwa Muhammad Idrus berasal dari satu dari ketiga kamboru-mboru Talupalena. Tepatnya berasal dari rumpun *Kaumu Kumbewaha*. Menurut Abd. Yunus (1995: 122-132) *Kaumu Kumbewaha* ini dikenal sebagai *Kaumu* yang berhasil mengambil alih usaha dominasi *Kaumu Tanailandu* di dalam upaya pengangkatan seseorang sebagai Sultan. *Kaumu Kumbewaha* juga dikenal sebagai *Kaumu* yang banyak menyumbangkan pemimpin-pemimpin dengan keilmuan agama yang tinggi, seperti: (1) Kakek Muhammad Idrus atau dikenal dengan Sultan La Jampi yang kemudian

bergelar Sultan Qaimudiin Tua, (2) Ayah Muhammad Idrus atau dikenal dengan Sultan Muhammad Asraruddin, hingga (3) anak-anak Muhammad Idrus, khususnya Sultan Muhammad Isa Kaimuddin dan Sultan Muhammad Salih Kaimuddin. Pemenuhan syarat sebagai seseorang yang berasal dari rumpun *Kaumu* dan seseorang yang memiliki ilmu dan penghayatan agama yang baik serta didukung dengan pembuktian di dalam suatu kepemimpinannya sebagai kapitalao, pada akhirnya dapat menjadi suatu bekal untuk memenuhi syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang Sultan.

Praktik Kepemimpinan Muhammad Idrus Kaimuddin sebagai Sultan Buton ke-29

Karakter sebagai seorang pemimpin yang memiliki keutamaan-keutamaan di dalam diri Muhammad Idrus, pada akhirnya terlihat di dalam aktivitas kepemimpinannya sebagai seorang Sultan. Beberapa karakter itu tercermin di dalam beberapa aspek yang menjadi sendi-sendi Kesultanan Buton, seperti:

Pertama, Melanjutkan tradisi kepemimpinan para sultan Buton terdahulu dengan menjunjung tinggi aturan-aturan adat yang terkandung di dalam Undang-undang Martabat tujuh, sebagai konstitusi negara Kesultanan Buton. Menurut Susanto Zuhdi, Dkk (1996: 24) Undang-undang Martabat tujuh merupakan konstitusi dari negara Kesultanan Buton, yang disusun oleh Sultan Buton ke-4, Sultan La Elangi atau lebih dikenal dengan Sultan Dayyanu Ikhsanuddin, yang memerintah sekitar tahun 1597-1631. Pada masa penyusunan itu, Sultan Dayanu Ikhsanuddin dibantu oleh Syekh Syarif Muhammad. Undang-undang Martabat Tujuh kemudian disahkan menjadi Undang-undang Kesultanan pada tahun 1610, dan masih terus ditaati dengan baik pada pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Hanya saja, Menurut La Ode Dirman (2018: 159) Undang-undang Martabat Tujuh ini kemudian mengalami revisi atau amandemen pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin.

Kedua, melakukan penghapusan kebijakan-kebijakan lama dalam hukum adat Kesultanan. Selain mengamandemen Undang-undang Martabat tujuh, serta berdasarkan hukum-hukum di dalam agama Islam, Sultan Muhammad Idrus juga menghapus beberapa kebijakan. Menurut Aslim (1995: 85-88) Kebijakan-kebijakan yang dihapus itu beberapa diantaranya ialah; *Pertama, Botu Bitara Arata Pusaka. Botu Bitara Arata Pusaka* adalah adat yang berkenaan dengan pembayaran wajib dari pihak ahli waris kepada orang tua yang berperan sebagai saksi. Terutama dalam kasus sengketa pewarisan harta pusaka peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris. Kebijakan itu dihapuskan oleh Sultan Muhammad Idrus berdasarkan pertimbangan yang diambil dari masukan tokoh-tokoh penasihatnya. Menurut La Ode Dirman (2018: 186) dalam pelaksanaan *botu bitara*, memiliki potensi yang besar pada tindakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh saksi tersebut untuk kepentingan pribadi, yang membawanya masuk ke dalam tindakan tercela. *Kedua, Kasapuina Lante (Penyapu Lantai). Kasapuina Lante* berkaitan dengan adat pembayaran wajib dari seseorang yang melakukan pengaduan di majelis tertinggi. *Ketiga*, Menghapuskan Pembayaran *Edah*. Pembayaran *Edah* berkaitan dengan perceraian. Namun demikian, pembayaran uang talak masih tetap diberlakukan. *Keempat*, Pembayaran wajib bagi pegawai yang diberhentikan/dipecat dan pembayaran wajib bagi pegawai baru.

Ketiga, melakukan perubahan-perubahan di dalam hukum adat Kesultanan. Sultan Muhammad Idrus pada masa kepemimpinannya juga melakukan beberapa perubahan-perubahan aturan yang telah berlaku dari kepemimpinan sebelumnya. Beberapa perubahan itu diantaranya ialah; *Pertama*, Perubahan hukuman bagi seorang yang melakukan pembunuhan kepada budak orang lain, yang semula berbentuk hukuman mati berubah menjadi hukuman denda yang dibayarkan kepada pemiliknya. Denda ini disesuaikan dengan umur pekerja ataupun potensi kemampuan kerja budak tersebut. *Kedua*, pembagian warisan yang semula menguntungkan anak laki-laki dengan perbandingan dua atau lebih banding satu bagi anak perempuan, kemudian diubah menjadi sama rata (Aslim, 1995: 88-89).

Keempat, menambah kebijakan-kebijakan di dalam Hukum Adat. Selain melakukan penghapusan dan perubahan terhadap aturan-aturan adat yang lama, Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin juga menambah kebijakan-kebijakan baru. Beberapa diantaranya ialah; *Pertama*, Penguatan sistem pertahanan seperti, membangun kesiapan pasukan dengan mendirikan pasar di beberapa tempat; (1) Daona (pasar) Lagonggo Wandoke di distrik Sampolawa, (2) Daona (pasar) Wajo Pasarwajo di distrik Pasarwajo, (3) Daona (pasar) Lasongko, di distrik Gu, dan (4) Daona (pasar) Kapuntori, di Distrik Kapuntori. *Kedua*, *Anana Bangule* atau putra mahkota yang semula dijaga agar tidak pernah terealisasikan di dalam keluarga inti Sultan, diizinkan dalam aturan adat yang baru. Kemudian, anak yang lahir dari Selir/gundik wajib untuk "dimandikan" oleh *syara'* agar dapat diakui sebagai anak Sultan atau keluarga ayahnya (Aslim, 1995: 92-96).

Kelima, menjalankan perannya sebagai seorang *khalifah*. Abd. Yunus (1995: 117-119) menjelaskan bahwa pucuk kepemimpinan di tanah Kesultanan Buton, selain disematkan gelar Sultan juga disematkan gelar *Khalifah* Allah. Berdasarkan penyematan gelar ini, Sultan di dalam Kesultanan Buton dapat diartikan sebagai wakil ataupun wujud Tuhan untuk masyarakat Buton. sebagai wujud Tuhan di Bumi dan dengan menggunakan kekuasaannya itu dianggap memiliki kemampuan dalam beberapa hal, baik yang bersifat material maupun bersifat spiritual. Abd. Yunus lebih lanjut menjelaskan bahwa, Sultan dengan kemampuannya dapat; *Pertama*, mampu melihat tingkah laku ataupun aktivitas kehidupan masyarakatnya, baik yang tampak atau dapat disaksikan dengan panca indra maupun yang tersembunyi atau tidak dapat ditangkap dengan panca indra. *Kedua*, mampu menguasai masyarakatnya, baik secara fisik maupun mentalnya, atau baik yang bersifat jasmani maupun rohani.

Keenam, kebijakan mengenai ilmu agama dan kesusastraan. Selain kebijakan-kebijakan di atas, Sultan Muhammad Idrus juga memiliki beberapa kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti; pertama, kebijakan-kebijakan di atas secara hampir seluruhnya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama yang disesuaikan dengan adat. Kedua, Pembuatan *Zawiyah*. *Zawiyah* secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti sudut, penjurur atau pojok. Dalam perkembangannya *Zawiyah* kemudian diartikan sebagai tempat bertemunya guru dan murid menimba ilmu pendidikan tentang ajaran-ajaran Islam. *Zawiyah* diperkirakan dibangun pada awal abad ke-19, saat Sultan Muhammad Idrus menjabat. Beberapa materi yang diajarkan pada saat itu berkaitan dengan ilmu tasawuf, ilmu fikih, ibadah dan akhlak. Ketiga, memberangkatkan beberapa orang untuk menimba ilmu di tanah Arab langsung dan membawanya pulang ke tanah air Kesultanan Buton. Tokoh-tokoh itu seperti Abdul Gafur (*kenepulu bula*), Sulaiman (Lakidende Lasalimu, dan Abdul Hadi. Keempat, memerintahkan untuk mempopulerkan seni suara melagukan Al-Quran, pelatihan Qutbah, dan setiap rumah tangga ikut andil di dalam perayaan Maulid Nabi. Hasil dari keberadaan *Zawiyah* dan pengiriman orang untuk menimba ilmu agama itu satu diantaranya adalah Sultan Muhammad Idrus berhasil membawa tradisi kesusastraan di kalangan cendekiawan Buton sampai pada puncaknya. Kelima, membangun masjid Quba Baadia Keraton Buton. Masjid ini kemudian di wasiatkan kepada penduduk Baadia untuk dijaga, dan dibangun kembali ketika mengalami kerusakan (robah) sehingga dapat dimanfaatkan terus menerus oleh anak cucu setelahnya (Aslim, 1995:78-91, Nanti.Dkk, 2018, dan Daliman, 2018: 184).

Keutamaan Moral pada Masa Paca Kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin

Sultan Muhammad Idrus mengakhiri jabatannya dengan meninggal dunia pada tahun 1851, dalam usia sekitar 67 Tahun (tahun ini disesuaikan dengan umur saat dilantik). Jabatan tertinggi Kesultanan kemudian diteruskan oleh *anana bangule* Sultan Muhammad Isa Kaimuddin II. Belum ditemukan atau setidaknya saat penelitian ini dilakukan, hasil laporan sejarah Buton yang menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan peninggalan

Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Isa Kaimuddin. Hanya saja, pergantian kekuasaan melalui jalur hak istimewa *anana bangule* semakin memicu konflik internal di dalam kaum bangsawan Kesultanan Buton.

Kematian Sultan Muhammad Idrus setidaknya meninggalkan banyak pesan-pesan bagi masyarakat Buton. Baik berbentuk wasiat, karya-karya sastra, dan hasil kebudayaan berbentuk benda. *Pertama*, pesan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin dalam bentuk wasiat, satu diantaranya disampaikan pada rakyat yang bermukim di wilayah Baadia, wilayah di sekitar Keraton Buton. La Ode Dirman (2018:192) menguraikan pesan itu sebagai berikut: 1) tetapkan segala yang wajib pada dirimu, seperti sembahyang (sholat) dan puasa sebagaimana ketika saya masih ada, 2) Jangan ramaikan kampung Baadia dengan keramaian yang mendatangkan maksiat, baik bersifat lahir maupun batin, dan 3) Hidupkan dalam hatimu untuk mengikuti perintah Tuhan, Rasulullah dan syariat.

Kedua, karya-karya Sultan Muhammad Idrus. Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin dikenal sebagai seorang Sultan, sufi dan pujangga yang berhasil menghasilkan banyak karya-karya sastra. Karya-karya itu disusun untuk memenuhi tanggung jawab moral Sultan Muhammad Idrus, baik sebagai seorang Sultan maupun sebagai seorang muslim yang memiliki keilmuan serta tanggung jawab untuk menyebarkannya kepada masyarakat luas. karya-karya itu beberapa diantaranya menggunakan bahasa Wolio dan beberapa lagi menggunakan bahasa Arab. Karya-karya itu beberapa diantaranya sebagai berikut:

Berbahasa Wolio/Buton:

1. *Bula Malino*
2. *Fakihi*
3. *Tazikiri Momampo Dona*
4. *Nuru Molabina*
5. *Taohara Maanikamu Molabi*

Bahasa Arab:

- | | | | |
|-----|------------------------------|----|----------------------------------|
| 1. | <i>Takhaatul Uturity-yat</i> | 12 | <i>Tankiyyatul Kulubi</i> |
| 2. | <i>Takhsyirul Aulaadi</i> | 13 | <i>Hadiy-yatul Basiyrul</i> |
| 3. | <i>Utural Miskiy-yat</i> | 14 | <i>HablalWasiyki</i> |
| 4. | <i>Siraajul Muttaqiyaa</i> | 15 | <i>Khaulil Mauruudi</i> |
| 5. | <i>Daaratyil Ikh-kaami</i> | 16 | <i>Ardatul-Muwah Hidiyna</i> |
| 6. | <i>Sabiylas Salaamu</i> | 17 | <i>Kasful Hijaabu</i> |
| 7. | <i>Syuunir Rakhmati</i> | 18 | <i>Uaharal Abhariy-yat</i> |
| 8. | <i>Targiybul Anaami</i> | 19 | <i>Misbaaburrajiyaa (salawa)</i> |
| 9. | <i>Bitakhfatur zaa-iriya</i> | 20 | <i>Midaadur Rakhwati</i> |
| 10. | <i>DliyaaulAnwaari</i> | 21 | <i>Sumuumaatil Warradi</i> |
| 11. | <i>Raudlaatil-Ikhwan</i> | | |

(Aslim, 1995: 8)

Ketiga, Pesan dalam bentuk benda-benda. Pesan Sultan Muhammad Idrus juga terlihat di dalam hasil-hasil kebudayaan berbentuk benda. Dua diantaranya adalah masjid dan naskah-naskah yang masih dapat dimanfaatkan hingga saat ini, terutama mesjid baadia.

Kandungan Nilai sebagai dasar Kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin

Beberapa keutamaan-keutamaan moral yang tergambarkan di dalam sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus di atas, menyimpan beberapa nilai-nilai moral. Nilai-nilai ini terang melekat pada keutamaan-keutamaan moral tersebut. Beberapa nilai-nilai yang terkandung beberapa diantara adalah sebagai berikut: Pertama, nilai Ketuhanan atau religius.

Nilai ketuhanan atau religius, nyatanya menjadi salah nilai yang dijunjung tinggi oleh Sultan Muhammad Idrus, baik di dalam hidupnya sendiri maupun di dalam kepemimpinannya di tengah-tengah masyarakat Buton. Bahkan hampir seluruh aspek-aspek kehidupan dan kepemimpinannya selalu didasarkan nilai-nilai ini. Kebijakan-kebijakan yang telah ada dan berlangsung, dan yang akan diusahakan berikutnya, selalu diuji dengan menggunakan nilai-nilai Ketuhanan atau religius, yang menyebabkan banyak kebijakan-kebijakan lama harus dihilangkan, diperbaiki dan ditambah dengan kebijakan-kebijakan baru yang sarat nilai-nilai tersebut.

Gambaran lain dari pelaksanaan nilai-nilai Ketuhanan atau religius, juga tergambar di dalam aktivitas dakwah dan keilmuan. Sultan Muhammad Idrus menyadari bahwa, moral masyarakat Buton harus didasarkan pada moral agama, khususnya agama Islam. Berdasarkan kesadaran itu, Sultan Muhammad Idrus kemudian secara besar-besaran membawa arus perubahan sastra lisan yang hanya berisi nilai-nilai hiburan menuju sastra tulis yang sarat nilai-nilai moral dan keagamaan. Tujuannya adalah mempermudah akses pengenalan dan arahan nilai-nilai moral agama sebagai pedoman hidup kepada masyarakat Buton. Dari aktivitas tersebut, sastra-sastra tulis yang sarat nilai moral dan keagamaan kemudian berkembang sangat pesat, bahkan beberapa sejarawan Buton menyebutkan perkembangan tersebut mencapai puncaknya. Perkembangannya ini juga didukung dengan kebijakan Sultan Muhammad Idrus yang mengirim beberapa pemikir untuk mengenyam pendidikan ilmu agama ke timur tengah, dengan tujuan untuk menyebarkannya kembali kepada masyarakat Buton.

Kedua, kedisiplinan. Setelah nilai Ketuhanan atau religius, Sultan Muhammad Idrus nampaknya mengemban serta mempraktikkan nilai kedisiplinan. Dimulai dari kehidupannya sebagai seorang *Anana Bangule*, Sultan Muhammad Idrus memiliki tanggung jawab untuk selalu mempraktekkan aturan-aturan yang ketat di dalam Kraton, layaknya putra mahkota di kerajaan-kerajaan lainnya. Tanggung jawab itu kemudian masih dibarengi dengan kedisiplinannya untuk mempelajari ilmu agama dari berbagai guru, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Kedisiplinannya kemudian semakin nampak, saat ditugaskan sebagai Kapitalao dan sebagai seorang Sultan.

Ketiga, Nilai Ketaatan. Ada beberapa praktik dari nilai ketaatan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Idrus baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat Buton sebagai seorang pemimpin. Di atas telah dikemukakan bahwa, Sultan Muhammad Idrus adalah seorang yang disiplin. Pada saat yang bersamaan jelas menunjukkan adanya ketaatan kepada aturan yang berlaku, ketaatan kepada dirinya sendiri untuk selalu konsisten mempelajari ilmu agama dari berbagai guru bahkan saat masih kanak-kanak dan terus berlangsung hingga dewasa.

Nilai ketaatan, selain itu juga terpraktikkan saat Sultan Muhammad Idrus mengemban jabatan sebagai seorang kapitalao dan sultan. Sebagai seorang kapitalao Sultan Muhammad Idrus tunduk pada aturan Sultan Anharuddin sebagai, sebagai sultan yang menjabat pada masa itu, dan aturan adat yang berlaku. Praktik itu terang terlihat saat terjadinya peristiwa pemindahan pucuk kepemimpinan dari Sultan Anharuddin kepada Sultan Muhammad Idrus. Di atas telah diuraikan bahwa, ada perintah dari Kesultanan untuk meninggalkan pasar wajo, sebagai daerah konflik, kepada Sultan Muhammad Idrus kaimuddin, sebagai seorang kapitalao. Di sisi yang lain, Pasar Wajo justru sedang menunjukkan situasi siaga, yang seharusnya Kapitalao terus berada di wilayah itu untuk mengantisipasi jika ada serangan susulan dari bajak laut, atau tobelo. Situasi dilematis itu, Sultan Muhammad Idrus memilih untuk memenuhi panggilan Sultan dan kembali ke Istana. Namun demikian, kembalinya itu bukan hanya dalam rangka memenuhi panggilan Sultan itu, tetapi juga dalam rangka mengajukan keberatannya kepada dewan sara. Sebab, Sultan Muhammad Idrus sebagai Kapitalao menyadari bahwa perintah untuk kembali yang dilayangkan oleh pihak istana kepada dirinya, telah menyalahi aturan adat yang berlaku.

Praktik nilai ketaatan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Idrus, sementara itu juga terlihat di dalam kebijakan-kebijakan. Di atas, juga telah dijabarkan bahwa, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Sultan Muhammad Idrus merupakan gambaran dari nilai keTuhanan dan Religiusitas, tetapi saat yang bersamaan kebijakan-kebijakan itu juga merupakan praktik dari nilai ketaatan. Dalam lingkup yang paling sempit, merupakan praktik ketaatan kepada Tuhannya, ketaatan kepada adat dan aturan-aturannya, Ketaatan kepada masyarakat yang dipimpinnya, serta ketaatan kepada keilmuan yang telah didapatkannya.

Keempat, Nilai Kejujuran. Satu aktivitas pada dasarnya dapat menjadi wujud dari pengejawantahan beberapa nilai. Seperti yang telah digambarkan dalam praktik nilai-nilai yang telah dijabarkan pada poin-poin di atas. Seperti dalam praktik menaati aturan-aturan yang berlaku dilingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan nilai kejujuran. Beberapa praktik dari nilai kejujuran sebagai bagian dari keutamaannya, tergambar di dalam beberapa aktivitas. Pertama, menjalankan tugasnya sebagai seorang Kapitalao dengan tidak melanggar aturan-aturan adat dalam hal kepemimpinan yang berlaku. Setidaknya, beberapa sumber sejarah tidak ada yang mencatatkan bahwa, Sultan Muhammad Idrus pernah meninggalkan pasukan dalam keadaan genting dan meninggalkan wilayah konflik, kecuali dalam perintah Sultan. Kedua, praktik nilai kejujuran tergambar di dalam kebijakan-kebijakan. Sultan Muhammad Idrus, harus mengabarkan secara baik kepada rakyatnya mengenai larangan dan anjuran yang harus dilakukan, meskipun dalam keadaan tertentu, kebijakan tersebut benar-benar bertentangan dengan keinginan masyarakat. Tindakan ini mungkin lebih terdengar seperti praktik nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Namun demikian, Sultan Muhammad Idrus adalah orang yang dibekali dengan keilmuan mengenai akhlak seorang pemimpin. Sehingga, praktik yang sesuai dengan keilmuannya tersebut, merupakan bagian dari kejujuran yang dipraktikkan oleh Sultan Muhammad Idrus, sebagai seorang pemimpin.

Kelima, Nilai tanggung jawab. Seperti beberapa gambaran praktik nilai-nilai di atas, beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Idrus juga merupakan praktik dari nilai tanggung jawab. Pertama, belajar agama dari usia kanak-kanak hingga dewasa merupakan bentuk tanggung jawab Sultan Muhammad Idrus sebagai seorang muslim. Terutama untuk kepentingan jangka panjang di dunia, seperti untuk kesiapan menjadi seorang Sultan bagi diri Sultan Muhammad Idrus, serta kehidupan setelah kematian, seperti pertanggung jawaban seorang Sultan kepada Tuhannya atas rakyat yang dipimpinnya. Kedua, setia untuk bersama-sama dengan pasukan saat bertugas mengamankan wilayah-wilayah pemerintahan Buton, terutama pada situasi-situasi genting/peperangan. Ketiga, usaha untuk mengamankan setiap wilayah juga merupakan bagian tanggung jawab Sultan Muhammad Idrus sebagai kapitalao kepada Sultan dan rakyat Buton. Keempat, menuliskan syair-syair bermuatan nilai-nilai moral dan agama, sehingga dapat menjadi pedoman bagi rakyatnya untuk bertingkah laku kepada sesamanya, sebagai bagian dari praktik nilai tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Kelima, memberangkatkan beberapa pemikir Buton untuk menimba ilmu sebagai bentuk praktik tanggung jawab Sultan Muhammad Idrus pada bidang keilmuan, terutama ilmu keagamaan Islam.

Keenam, nilai keadilan. Beberapa aktivitas praktik dari nilai keadilan terlihat jelas dalam beberapa aktivitas berikut. Pertama, memberangkatkan beberapa pemikir Buton, sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan masyarakat Buton, terhadap kehadiran ulama dan pemikir untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan masyarakat Buton. Kedua, karya-karya bermuatan moral, sebagai pemenuhan secara merata kepada masyarakat Buton mengenai pedoman bertingkah laku yang dapat dimanfaatkan bersama. Ketiga, menghilangkan kebijakan-kebijakan yang memberatkan masyarakat menengah kebawah, sebagai bentuk keadilan masyarakat kecil.

Relevansi Prinsip-prinsip Moral dari Kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin untuk manusia yang bermoral

Pada latar belakang di atas telah dijelaskan bahwa ada satu dari berbagai persoalan moral yang kerap terjadi di lingkungan sosial manusia, yakni adanya jarak antara nilai, ajaran dan aturan-aturan moral yang telah ditetapkan sebagai kaidah bersama dengan pengejawantahannya di dalam lingkup wilayah tersebut. Dengan kata lain, ajaran dan aturan-aturan moral itu hanya dianggap sebagai seperangkat narasi moral yang menyimpan nilai kebaikan dan nilai kebenaran semata namun banyak individu yang menjadi bagian dari masyarakat tidak mengamalkan serta menghayatinya dengan baik. Ada banyak kemungkinan yang berkenaan dengan persoalan ini, misalnya, seorang pemimpin negara yang harus menunjukkan sikap tenang dan biasa saja saat bahaya yang melanda negaranya agar tidak terjadi kekacauan yang besar dan berakibat buruk pada proses pencarian penanggulangan dari bahaya tersebut, atau seorang dokter yang bekerja di rumah sakit lebih memilih untuk membantu pasien yang sangat kesakitan untuk melakukan tindakan eutanasia dan melanggar aturan rumah sakit serta kode etik kedokteran, dan tentu masih banyak kasus moral dalam fenomena-fenomena sosial lainnya yang membuat ajaran dan aturan-aturan moral itu harus dilanggar. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang memantik potensi terjadinya jarak itu terbentuk.

Berdasarkan perspektif etika keutamaan, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada persoalan di atas merupakan hasil dari keterfokusan penilaian pada satuan tindakan. Sebab tindakan seperti berkata jujur yang memiliki nilai baik pada dirinya sendiri seperti pandangan deontologi dalam kondisi tertentu menghasilkan akibat yang buruk, sementara itu tindakan berbohong yang memiliki nilai buruk pada dirinya sendiri justru dalam kondisi tertentu menghasilkan akibat yang baik. Oleh karena itu Alasdair MacIntyre, seorang profesor etika yang menghadirkan etika keutamaan di era modern, menempatkan fokus pada satuan tindakan pada lapisan kedua di dalam etika dan menempatkan fokus pada karakter manusia pada lapisan pertama (Magnis-Suseno, 2000: 198-199). Dengan kata lain, saat manusia memiliki karakter yang baik dengan keutamaan-keutamaan di dalam dirinya, maka kasus-kasus dilematis seperti di atas dapat diselesaikan dengan bijaksana.

Cara yang dapat digunakan untuk membantu manusia dalam membentuk keutamaan-keutamaan moral serta karakter yang baik di dalam dirinya adalah dengan mempelajari dan meneladani sejarah masa lampau. Termasuk di dalamnya sejarah kepemimpinan salah seorang pemimpin besar dalam suatu wilayah, baik yang sedang mengemban jabatan maupun pemimpin pada masa lampau. Sejarah itu memuat ajaran dan aturan-aturan yang didasarkan atas nilai-nilai moral serta penggambaran dalam bentuk-bentuk pengejawantahannya yang dipraktikkan oleh pelaku-pelaku di dalamnya. Praktik dari ajaran, aturan, dan nilai-nilai moral yang dilakukan oleh pelaku-pelaku sejarah tersebut, pada akhirnya menyimpan prinsip-prinsip tindakan sederhana yang mempermudah bagi seorang pemerhati sejarah sekaligus pelaku moral untuk menjadikannya sebagai keutamaan-keutamaan moral di dalam dirinya dan menjadikannya seseorang yang memiliki karakter baik. Sehingga jarak yang memisahkan antara nilai, ajaran dan aturan-aturan moral dapat diatasi dengan baik.

Bagi masyarakat Buton, pembentukan keutamaan-keutamaan moral serta pribadi-pribadi yang memiliki karakter baik di dalam dirinya dapat melalui pembelajaran dari sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin. Di dalam sejarah itu memuat gambaran cara Sultan Muhammad Idrus yang memiliki keutamaan-keutamaan moral serta dikenal sebagai pribadi yang memiliki karakter kepemimpinan yang baik dalam bertingkah laku dan menjalankan perannya baik sebagai seorang muslim maupun sebagai seorang pemimpin atau Sultan. Selain itu sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad idrus juga menyimpan prinsip-

prinsip tindakan sederhana yang dapat menjadi teladan dalam proses pembentukan keutamaan-keutamaan serta karakter yang baik bagi masyarakat Buton. Berdasarkan uraian sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus di atas, dapat diketahui prinsip-prinsip moral yang dapat digunakan oleh masyarakat Buton, beberapa diantaranya ialah:

Prinsip Ketaatan

Prinsip pertama yang dapat menjadi keutamaan moral dari setiap diri manusia, yang juga telah jelaskan dan dipraktekkan oleh Sultan Muhammad Idrus adalah prinsip ketaatan. Pertama, taat kepada Allah SWT dan Rasulullah. Taat kepada Allah SWT dan Rasulullah berarti menjalankan dengan penuh pemaknaan seluruh anjuran-anjuran dan kewajiban-kewajiban serta menjauhi larangan-larangan yang datang dari Tuhan yang disampaikan kepada hambanya melalui Rasulullah. Meskipun, dalam beberapa aspek, tidak sesuai dengan kemauan dan kehendak manusia. Harus menjadi catatan penting adalah, prinsip ini memiliki daya yang cukup kuat bagi kehidupan manusia. Sultan Muhammad Idrus di atas, telah mempraktekkan bahwa ketaatan kepada Allah SWT. benar-benar telah melahirkan banyak hal dan membatasi banyak hal. Kedua, taat kepada aturan adat dan pimpinan. Dalam rangka menjadi manusia yang baik melalui laku kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus di atas, selain ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah, juga harus taat kepada aturan adat yang berlaku dan taat kepada pimpinan. Namun demikian, persoalan yang kemudian rawan muncul adalah terjadinya kasus pertentangan antara keharusan memiliki ketaatan kepada aturan yang berlaku dan ketaatan kepada pimpinan, seperti juga yang dihadapi Sultan Muhammad Idrus saat menjabat sebagai *Kapitalao*.

Prinsip Kedisiplinan

Pada uraian mengenai keutamaan moral di atas, telah dikemukakan bahwa keutamaan merupakan hasil dari proses pembiasaan yang panjang. Oleh karena itu, prinsip kedisiplinan layaknya yang telah dipraktekkan oleh Sultan Muhammad Idrus memiliki peranan yang sangat penting, dan harus menjadi pedoman utama dalam menjalankan hal-hal yang baik.

Prinsip Kejujuran

Proses menjadi manusia baik, pada dasarnya harus melalui latihan yang terus menerus, dan bersifat korektif. Satu diantara aktivitas yang harus menjadi keutamaan itu adalah menjalani kejujuran. Sultan Muhammad Idrus di atas, telah memberikan gambaran bahwa, aktivitas latihan dengan berpegang pada prinsip kejujuran dapat pada lingkungan dan situasi sederhana hingga situasi yang rumit. Seperti dalam situasi belajar maupun saat mengemban tugas.

Prinsip Tanggung jawab

Prinsip berikutnya untuk mengantarkan manusia memiliki menjadi baik, yang memiliki keutamaan-keutamaan moral di dalam dirinya, adalah prinsip tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berkaitan dengan suatu kepercayaan seseorang atau lebih kepada seorang atau lebih sesamanya. Biasanya menempel pada inangnya seperti suatu jabatan yang diemban, pekerjaan, status sosial, dan sebagainya. Sultan Muhammad Idrus kurang lebih mencontohkan keutamaan itu, dalam beberapa status sosial dan jabatan sebagai

berikut: Pertama, sebagai seorang pemeluk agama islam atau sebagai seorang muslim dengan secara konsisten mempelajari agama sejak dini dan merealisasikannya dalam aktivitas-aktivitas kehidupannya, dan Kedua, jabatan sebagai; 1) Kapitalao, dengan wujud secara konsisten bekerja secara baik, tidak meninggalkan pasukan di wilayah perang, dan taat kepada aturan serta perintah atasan, Sultan Buton, 2) Sultan, dengan wujud secara konsisten memimpin dengan nilai-nilai agama Islam dan adat Buton, untuk merumuskan serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang siap digunakan untuk kemaslahatan masyarakat Buton.

Prinsip Keadilan

Prinsip terakhir yang dapat diusahakan sebagai keutamaan moral bagi masyarakat, dari keutamaan moral yang dipraktikan oleh Sultan Muhammad Idrus adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dapat menjadi acuan untuk berbagai aktivitas yang bersangkutan dengan sesamanya. Dalam keutamaan moral Sultan Muhammad Idrus dicontohkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebaikan banyak orang. Tentu bagi masyarakat saat ini, contoh ini dapat dikembangkan lebih jauh dalam aktivitas yang beragam.

Kesimpulan

Berdasarkan teori etika keutamaan, kemudian dapat diketahui beberapa kesimpulan mengenai moral keutamaan di dalam sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin di negara Kesultanan Buton sebagai berikut: *Pertama*, penyebab dan jalan keluar atas persoalan jarak antara nilai, ajaran, dan aturan-aturan moral dengan pengejawantahan di dalam lingkungan sosial manusia. Menurut etika keutamaan, persoalan jarak itu berkaitan dengan dua hal: (1) tidak dimilikinya keutamaan-keutamaan moral pembentuk karakter yang baik pada diri manusia, dan (2) berfokus pada satuan tindakan. Kedua faktor ini membuat manusia tidak berada pada garis yang mampu mendorong dirinya untuk melakukan, membiasakan, dan meningkatkan tindakan-tindakan yang baik dalam lingkungan sosial. Sehingga, untuk memangkas jarak tersebut setiap individu yang menjadi bagian dari anggota masyarakat harus memiliki keutamaan-keutamaan moral serta memiliki karakter yang baik. Satuan tindakan harus ditempatkan pada lapisan kedua pada proses tersebut sebagai sarana pembentukan keutamaan-keutamaan moral dan karakter yang baik.

Kedua, untuk membentuk keutamaan dengan jalan pembiasaan dan peningkatan tindakan-tindakan yang baik, dapat menggunakan ajaran-ajaran moral yang telah dipraktikan oleh tokoh tertentu maupun sejarah masa lalu. Sebab di dalam pembelajaran itu, mengandung nilai dan ajaran moral yang telah dipraktikan oleh tokoh utama. Sehingga dapat menjadi acuan di dalam mengamalkan, membiasakan dan meningkatkan satuan-satuan tindakan yang dapat membentuk keutamaan-keutamaan moral di dalam diri manusia.

Ketiga, keutamaan moral Sultan Muhammad Idrus di dalam sejarah kepemimpinannya di Kesultanan Buton. Keutamaan moral di dalam sejarah kepemimpinan Sultan Muhammad Idrus, dapat dilihat di dalam fase pra memerintah, saat memerintah, dan pasca memerintah. Di dalam kepemimpinan itu, Sultan Muhammad Idrus setidaknya menampilkan beberapa nilai moral utama yang membentuk keutamaan di dalam dirinya, yaitu: nilai ketuhanan atau religius, kedisiplinan, nilai ketaatan, nilai kejujuran, nilai tanggung jawab. Nilai-nilai ini kemudian dapat melahirkan beberapa prinsip tindakan yang dapat diteladani oleh masyarakat Buton, yaitu; Belajar dengan konsisten, ketaatan (baik taat kepada Allah SWT dan Rasulnya, serta taat kepada peraturan adat dan pemimpinnya), kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, adil/keadilan. Konsep moral keutamaan inilah yang dapat ditawarkan untuk menjadi salah satu

jalan bagi masyarakat Buton di dalam membangun keutaman-keutamaan serta karakter moral di dalam dirinya, saat potensi jarak itu mulai membesar di dalam lingkungan sosial masyarakat Buton.

Daftar Pustaka

- Aslim, 1995, *Kesultanan Buton Pada Masa Pemerintahan sultan Muhammad Idrus 1824-1851*, Skripsi S-1 Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bakker, Anton & Zubair, Charris., 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bertens, K., 2013, Edisi Revisi, *Etika*, Kanisius, Yogyakarta.
- Dirman, La Ode, 2018, *Sejarah dan Etnografi Buton*, Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra, Kendari.
- Keraf. Sony., 2004, *Etika Lingkungan*, Kompas, Jakarta.
- Kusmaryanto, C.B., 2022, *Bioetika Fundamental*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Magnis-Suseno, 2000, *12 Tokoh Etika; Abad Ke-20*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nanti, Dkk., 2018, Pendidikan Islam di Zawiyah Pada Masa Kesultanan Buton Abad ke-19 , *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 06 nomor 3, Desember 2018, UIN Alauiddin, Makassar.
- Niampe, La., 2010, *La Ode Muhammad Idrus Qaimuddin Sastrawan Sufi Ternama di Buton Abad XIX*, Humaniora, Volume 22 No 3 Oktober 2010, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Schoorl, Pim, 2003, *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*, Penerbit Djambatan KITLV, Jakarta
- Yunus, Abd., 1995, *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada abad ke-19*, INIS, Jakarta.
- Zuhdi, Susanto, Dkk., 1996, *Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara : Kesultanan Buton*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.